

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**RENCANA KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
TAHUN 2022**



DINAS TENAGA KERJA

JL. Veteran No. 72 Telp. (0334) 881546 Lumajang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaianan Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA	43
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	45
3.3 Program dan Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	69
BAB V PENUTUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 21 ayat 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra OPD. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja memerlukan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Proses penyusunan Renja tersebut mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu penyusunan Renja dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Tenaga Kerja, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi terhadap pencapaian Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 berdasarkan pada regulasi sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi;
15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/418/427.12/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 tanggal 1 Desember 2020;
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Nomor 791 Tahun 2018 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja adalah :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2022;
- c. Optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis perangkat daerah
- d. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Tenaga Kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja agar substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Menuliskan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISNAKER TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnaker Tahun Lalu dan Capaian Renstra Disnaker

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disnaker tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD Dinas Tenaga Kerja.

2.2 Analisis Kinerja Disnaker

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disnaker

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
- e. Formulasi dan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap rancangan awal RPKD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RPKD dengan hasil analisis kebutuhan
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RPKD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini adalah :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dilakukan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan tentang uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi : jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

BAB V PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2020 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 9 (sembilan) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp 2.260.378.528,00 (dua milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) . dalam pelaksanaan program tersebut dapat diselesaikan hampir seluruhnya dengan optimal. Secara detail pelaksanaan untuk program-program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Program Pembinaan Lingkungan Sosial dilaksanakan di bidang ketenagakerjaan dengan sumber dana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000.000,00 yang meliputi 3 (tiga) kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja. Adapun program ini pada

pelaksanaannya diampu oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Adapun dengan realisasi sebesar Rp 1.195.617.750,00 atau sebesar 79,71.% dengan sisa anggaran sebesar Rp 304.382.250,00. Berikut ini rincian masing-masing kegiatan adalah :

- a. Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator kegiatan adalah jumlah penganggur dan setengah penganggur yang ditempatkan. Capaian kegiatan ini sebesar 73,31% dengan serapan anggaran sebesar Rp 733.061.250,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 266.938.750,00. Adapun alasan penyerapan tersebut dikarenakan kegiatan tersebut dianggarkan melalui proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang ditetapkan pada tribulan III. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada Bulan November, hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan padat karya dilaksanakan tidak sesuai rincian DPA.
- b. Kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dengan pagu anggaran sejumlah Rp 451.250.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dengan indikator kegiatan adalah jumlah pencari kerja yang dilatih. Capaian kegiatan ini sebesar 99,46% dengan serapan anggaran sebesar Rp 448.809.000,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 2.441.000,00.

- c. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp 48.750.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator kegiatan ini adalah jumlah pencari kerja yang mengikuti bursa kerja dan ditempatkan. Capaian kegiatan ini sebesar 28,20% dengan serapan anggaran sebesar Rp13.747.500,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 35.002.500,00, dikarenakan kegiatan tersebut dianggarkan melalui proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang ditetapkan pada tribulan III. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada Bulan Oktober, namun karena perkembangan Pandemi Covid 19 yang terus meningkat dan pelaksanaannya memerlukan persetujuan dan pertimbangan Bupati, sehingga akan diselenggarakan pada Minggu akhir bulan November 2020. Kasus Covid 19 semakin meningkat dan pada November minggu III - IV dan Kabupaten Lumajang dengan kategori Zona Merah, sehingga berisiko untuk melakukan kegiatan dengan pengumpulan orang dalam jumlah banyak. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan beberapa OPD dan pihak Kepolisian, serta mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 November 2020 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka kegiatan Bursa Kerja Mini tidak dapat diselenggarakan.
- d. Capaian kegiatan ini sebesar 28,20% dengan serapan anggaran sebesar Rp 13.747.500,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 35.002.500,00. Adapun realisasi yang rendah dikarenakan anggaran tersebut merupakan anggaran yang melalui proses

Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sehingga ditetapkan pada tribulan III. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada Bulan Oktober, namun karena perkembangan Pandemi Covid 19 yang terus meningkat, untuk melaksanakannya memerlukan persetujuan dan pertimbangan Bupati, dan ditetapkan diselenggarakan pada Minggu akhir bulan November 2020. Kasus Covid 19 semakin meningkat dan pada November minggu III - IV dan Kabupaten Lumajang masuk pada Zona Merah, sehingga berisiko untuk melakukan kegiatan dengan pengumpulan orang dalam jumlah banyak. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan beberapa OPD dan Pihak Kepolisian, serta mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 November 2020 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kegiatan Bursa Kerja Mini tidak dapat diselenggarakan.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Tenaga Kerja sehingga terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan yaitu Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang diampu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Alokasi anggaran sebesar Rp 436.615.028,00 dengan realisasi sebesar Rp 417.640.805,00 atau sebesar 95,65% dan sisa anggaran sebesar Rp 18.974.223,00 .

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Tenaga Kerja. Program ini

terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur yang diampu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.352.000,00 dengan serapan sebesar 99,63% atau sejumlah Rp 42.195.302,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 156.698,00.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pagu dari program ini sebesar Rp 8.372.000,00 dengan serapan sebesar 99,45% atau sebanyak Rp 8.326.000,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 46.000,00. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP yang diampu oleh Sub Bagian Penyusunan Program dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.730.000,00 dengan realisasi 99,02% atau sejumlah Rp 4.684.000,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 46.000,00.
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diampu oleh Sub Bagian Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.642.000,00 dengan realisasi 100%.
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang diampu oleh Sub Bagian Penyusunan Program dengan anggaran sebelum perubahan Rp 4.519.000,00 dan mengalami perubahan anggaran dikarenakan *self blocking* menjadi 0.
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja serta kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja yang keduanya diampu oleh

Bidang Pelatihan Tenaga Kerja. Pagu dari program ini adalah 73.955.000,00 dengan realisasi sebesar 100%. Adapun rincian kegiatan yang termasuk program ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja dengan indikator jumlah pencari kerja yang dilatih diampu oleh Seksi Pelatihan Kerja. Adapun pagu anggaran Rp 69.405.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 69.405.000,00
- b. Fasilitasi dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja dengan indikator jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina. Apagu anggaran Rp 4.550.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 4.550.000,00

6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pagu dari program ini adalah Rp. 74.100.000,00 dengan serapan sebesar 100%. Program ini diampu bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dimana terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

- a. Perluasan Kesempatan Kerja melalui Sistem Padat Karya yang diampu oleh Seksi Perluasan Kesempatan Kerja. Indikator kegiatan ini adalah jumlah penganggur dan setengah penganggur yang ditempatkan. Adapun anggaran sebelum perubahan Rp 122.515.000,00 dan mengalami perubahan anggaran dikarenakan *self blocking* menjadi 0.
- b. Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri yang diampu oleh Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dengan pagu anggaran Rp 74.100.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 74.100.000,00. Adapun indikator dari kegiatan ini adalah jumlah pencari kerja yang difasilitasi.

7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dimana program ini diampu oleh Bidang Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pagu program ini adalah 95.820.000,00 dengan serapan sebesar 100%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan pagu anggaran Rp 4.505.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 4.505.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan indikator jumlah kasus perselisihan yang difasilitasi.
- b. Fasilitasi dan Koordinasi Penetapan UMK dengan pagu anggaran Rp 85.425.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 85.425.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan indikator yaitu jumlah rumusan usulan UMK (Upah Minimum Kerja) yang dibuat dan jumlah perusahaan yang dipantau tentang pelaksanaan syarat kerja, UMK, dan jaminan sosial.
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dengan pagu anggaran Rp 5.890.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 5.890.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Seksi Kelembagaan Tenaga Kerja dengan indikator jumlah perusahaan dan lembaga ketenagakerjaan yang dibina.

8. Program Pengembangan Ketenagakerjaan

Program ini diampu oleh Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 18.607.500,00 dengan realisasi sebesar 100%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp 7.532.500,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 7.532.500,00. Kegiatan ini diampu oleh Seksi Produktifitas Tenaga Kerja dengan indikator jumlah tenaga kerja yang dilatih

- b. Validasi Data dan Informasi Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp 6.250.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp 6.250.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Seksi Pendataan dan Informasi Ketenagakerjaan dengan indikator jumlah perusahaan yang diinventarisir.
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaran Rp 4.925.000,00 dengan realiasasi 100% atau sebesar Rp 4.925.000,00. Kegiatan ini diampu oleh Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan indikator jumlah perusahaan yang dimonitor.

9. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran untuk Memenuhi Kebutuhan SDM dengan pagu anggaran Rp 10.457.000,00 dengan realiasasi 100% atau sebesar Rp 10.457.000,00. Program ini diampu oleh seksi Ketransmigrasian pada Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dengan indikator jumlah calon transmigran yang dilatih dan jumlah calon transmigran yang ditempatkan.

Capaian indikator kinerja keseluruhan di Dinas Tenaga Kerja telah mendekati optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan peningkatan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Lumajang dengan tingkat serapan anggaran 85,69% atau sebesar Rp 1.936.819.357,00 dengan sisa anggaran Rp 323.559.171,00. Evaluasi capaian hasil indikator kinerja sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.29

TC-.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan: 2021 - saat penetapan Renja 2022)
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah: Dinas
Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020 (Renja PD)			Target Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n- 1- 2021 (Renstra PD)	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2020	Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
2 07	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									

2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja dilatih	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
							Persentase Peningkatan Produktifitas Perusahaan	100%	100%	100%	81.82%	81.82	100%	94%	93.94
2	07	03	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi	20 orang	10 orang	0	0	0	20 orang	10 orang	50
2	07	03	2	01	01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari iKerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja di latih berdasarkan Klaster Kompetensi	120 orang	140 orang	140 orang	140 orang	100	240 orang	174 orang	72.5
2	07	03	2	02		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja dibina	100%	100%	100%	106.67%	106.67	100%	102.22%	102.22
2	07	03	2	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja dibina	17 LPKS	15 LPKS	15 LPKS	16 LPKS	106.67	16 LPKS	16 LPKS	100

2	07	03	2	04		Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Perusahaan kecil yang Melakukan Konsultasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
							Prosentase Perusahaan yang di Monev	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	07	03	2	04	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang melakukan Konsultasi	70 perusahaan	12 perusahaan	11 perusahaan	11 perusahaan	100	15 perusahaan	13 perusahaan	86.67
							Jumlah Perusahaan yang di Monev	70 perusahaan	12 perusahaan	11 perusahaan	11 perusahaan	100	15 perusahaan	13 perusahaan	86.67
3	23	03				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase transmigran terlatih yang ditempatkan	100%	100%	0%	0	0	0%	33.30%	0.00%
3	23	03	2	01		Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah KK Transmigran ditempatkan	5 KK	7 KK	0 KK	0	0	0 KK	3 KK	0
3	23	03	2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah	Jumlah KK Transmigran diberangkatkan	5 KK	7 KK	0 KK	0	0	0 KK	3 KK	0

2	07	04	2	03	03	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari ditempatkan melalui penyelenggaraan Bursa pasar kerja	150 orang	646 orang	750 orang	321	42.8	100 orang	356 orang	356
2	07	04	2	04		Kegiatan Pelindungan PMI (PradanPurnaPempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang di fasilitasi	100 orang	277 orang	300 orang	267 orang	89	56 orang	200 orang	357.14
2	07	04	2	04	01	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah PMI yang di fasilitasi	100 orang	277 orang	300 orang	267 orang	89	56 orang	200 orang	357.14
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	prosentase perusahaan yang mempunyai PP	24%	21.78%	22%	21.78%	99	23%	22.19%	96.48%	
						prosentase data dan informasi ketenagakerjaan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
2	07	05	2	01		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang	jumlah dokumen peraturan perusahaan yang disahkan	15 dok	22 dok	15 dok	13 dok	86.67	15 dok	17 dok	133

						hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							jumlah perusahaan yang didata	75 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	300 perusahaan	300	60 perusahaan	154 perusahaan	256.67					
2	07	05	2	01	01	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	15 dok	22 dok	15 dok	13 dok	86.67	15 dok	17 dok	113.33					
2	07	05	2	01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	jumlah pendataan perusahaan yang dilaksanakan	75 Perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	300 perusahaan	300	60 Perusahaan	154 Perusahaan	256.67					
2	07	05	2			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi	15 Kasus	13 Kasus	15 Kasus	14 kasus	93.33	10 kasus	13 kasus	130					

2	07	05	2	02	02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Peselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	15 Kasus	13 Kasus	15 Kasus	14 kasus	93.33	10 kasus	13 kasus	130
2	07	05	2	02	02	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah perusahaan yang di Monitoring Pengupahannya dan pelaksanaan Jamsosteknya	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	0	0	100 perusahaan	67 perusahaan	67
2	07	01				PROGRAM PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	07	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

2	07	01	2	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	07	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	5 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100	5 dokumen	12 dokumen	240
2	07	01	2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Penyusunan IKM	2 kali	0	0	0	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	07	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	07	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	33 ASN	28 ASN	29 ASN	29 ASN	100	31 ASN	31 ASN	100
2	07	01	2	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Fasilitas Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

2	07	01	2	02	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	12 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	07	01	2	02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
2	07	01	2	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0 dokumen	0
2	07	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	07	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Yang disediakan	4 jenis	9 jenis	10 jenis	10 jenis	100	4 jenis	8 jenis	200
2	07	01	2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100

2	07	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan yang disediakan	5 jenis	11 jenis	6 jenis	6 jenis	100	5 jenis	5 jenis	100
							Jumlah Fasilitas Penggandaan Dokumen	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0 bulan	0
2	07	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rakor SKPD	12 kali	0	0	0	0	0	0	0
							Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	100
2	07	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	07	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar	5 rekening	5 rekening	5 rekening	5 rekening	100	5 rekening	5 rekening	100
2	07	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitas Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	100
2	07	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

						Pemerintahan Daerah									
2	07	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dipelihara	20 kendaraan dinas	20 kendaraan dinas	20 kendaraan dinas	20 kendaraan dinas	100	20 kendaraan dinas	20 kendaraan dinas	100
2	07	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lain yang dipelihara	3 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dinas tenaga kerja dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- d. Pelaksanaan administrasi dinas tenaga kerja
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Upaya Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja sebagai tujuan jangka menengah dapat dilihat dari beberapa strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan keterampilan
2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja
3. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan memonitor pelaksanaannya
4. Melaksanakan pendataan dan monitoring penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan

Dalam analisa kinerja Dinas Tenaga Kerja, telah dijabarkan indikator penetapan kinerja yang tersaji pada **Tabel T-C. 30**

TC-.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lumajang

NO	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra PD	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)-2020	Tahun (thn n-1)-2021	Tahun (tnn n)-2022	Tahun (thn n+1)-2023	Tahun (thn n-2)-2020	Tahun (thn n-1)-2021 (perkiraan)	Tahun (tnn n)-2022	Tahun (thn n+1)-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9+6)/2	(11)=(7)	(12)=(8)	(13)
1	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif		-	100%	100%	100%	100%	81.82%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan		-	70%	46%	47%	48%	122.93%	46%	47%	48%	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		-	63%	67%	68%	69%	62.52%	67%	68%	69%	
5	Persentase penempatan transmigran sesuai standar		-	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja terdapat beberapa isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah angkatan kerja yang memiliki keahlian dan atau ketrampilan masih relatif kecil mengakibatkan rendahnya kualitas dan daya saing dalam pemenuhan kesempatan kerja.
- b. Terbatasnya perkembangan usaha swasta di sektor industri menengah keatas yang diharapkan dapat menampung angkatan kerja lulusan sekolah kejuruan yang tersedia cukup banyak di Kabupaten Lumajang sehingga mengakibatkan sedikitnya peluang/kesempatan kerja yang tersedia bagi penganggur.
- c. Penempatan transmigrasi yang masih ketergantungan dengan kuota yang ditentukan oleh Pemerintah Propinsi/Pusat serta Daerah sehingga mengakibatkan penempatan calon transmigran jumlahnya relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah pendaftar calon transmigran.
- d. Meningkatnya jumlah penganggur terbuka karena tambahan angkatan kerja baru, dan pekerja terdampak covid 19.
- e. Peminat transmigrasi/calon transmigran reguler yang mendaftar sangat terbatas akibat kurangnya informasi dan pemahaman tentang transmigrasi.
- f. Rendahnya motivasi angkatan kerja untuk berwirausaha, karena keterbatasan ketrampilan dan modal usaha, serta kurangnya akses pasar.
- g. Rendahnya kesejahteraan pekerja/buruh dimana UMK belum sepenuhnya dilaksanakan.

- h. Kemampuan perusahaan dalam memberikan upah dan kesejahteraan kepada pekerja masih terbatas.
- i. Relatif rendahnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- j. Rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

TC-.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Rp 11.00	12
1						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Lumajang	Prosentase Pencari Kerja dilatih	100%	Rp 535,313,300.00	
							Kab. Lumajang	Persentase Peningkatan Produktifitas Perusahaan	100%		
A						Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Lumajang	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi	20 orang	Rp 450,000,000.00	
1)						Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Kab.Luma jang	Jumlah pencari kerja di latih berdasarkan Klaster Kompetensi	120 orang	Rp 450,000,000.00	

					Berdasarkan Klaster Kompetensi					
B					Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPK Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja dibina	100%	Rp 25,313,300.00	
1)					Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPK Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja dibina	17 LPKS	Rp 25,313,300.00	
C					Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker	Prosentase Perusahaan kecil yang Melakukan Konsultasi	100%	Rp 60,000,000.00	
						Perusahaan	Prosentase Perusahaan yang di Monev	100%		
1)					Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker	Jumlah Perusahaan kecil yang melakukan Konsultasi	70 perusahaan	Rp 60,000,000.00	
						Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang di Monev	70 perusahaan		
2					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Lumajang	Prosentase transmigran terlatih yang ditempatkan	100%	Rp 149,271,200.00	
A					Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(Satu)	Kab. Lumajang	Jumlah KK Transmigran ditempatkan	5 KK	Rp 149,271,200.00	

					Daerah Kabupaten /Kota					
1)					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Lumajang	Jumlah KK Transmigran diberangkatkan	5 KK	Rp 94,271,200.00	
2)					Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi	Kab. Lumajang	Jumlah Calon Transmigran dilatih	20 KK	Rp 20,000,000.00	
3)					Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Lumajang	Jumlah Calon Transmigran yang diberikan penyuluhan	25 KK	Rp 35,000,000.00	
3					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Lumajang	Prosentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan / difasilitasi	47%	Rp 800,000,000.00	
A					Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	jumlah jenis pelayanan yang di lakukan	3 jenis	Rp 400,000,000.00	
2)					Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Desa	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	400 orang	Rp 400,000,000.00	
B					Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disnaker	Jumlah jenis media informasi pasar kerja yang di kelola	3 jenis	Rp 200,000,000.00	

3)						Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Lumajang	Jumlah pencari ditempatkan melalui penyelenggaraan Bursa pasar kerja	150 orang	Rp 200,000,000.00	
C						Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Desa	Jumlah PMI yang di fasilitasi	150 orang	Rp 200,000,000.00	
1)						Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Desa	Jumlah PMI yang di fasilitasi	150 orang	Rp 200,000,000.00	
4						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker	prosentase perusahaan yang mempunyai PP	24%	Rp 153,764,000.00	
							Perusahaan	prosentase data dan informasi ketenagakerjaan yang tersedia	100%		
A						Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk	Disnaker	jumlah dokumen peraturan perusahaan yang disahkan dan jumlah perusahaan yang di bina	15 dokumen	Rp 100,000,000.00	

					Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan	jumlah perusahaan yang didata	75 perusahaan		
1)					Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Disnaker	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	15 dokumen	Rp 50,000,000.00	
2)					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Perusahaan	jumlah pendataan perusahaan yang dilaksanakan	75 perusahaan	Rp 50,000,000.00	
B					Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang difasilitasi	15 kasus	Rp 53,764,000.00	

1)						Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	15 kasus	Rp 13,764,000.00	
2)						Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Lumajang	Jumlah perusahaan yang di Monitoring Pengupahannya	100 perusahaan	Rp 40,000,000.00	
5						PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Disnaker	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	Rp 4,810,000,000.00	
A						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	Rp 30,000,000.00	

1)						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Rp 10,000,000.00	
2)						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen LAKIP	5 dokumen	Rp 10,000,000.00	
3)						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah fasilitasi penyusunan IKM	2 kali	Rp 10,000,000.00	
B						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 3,940,000,000.00	
1)						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Disnaker	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	33 ASN	Rp 3,850,000,000.00	
2)						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disnaker	Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	Rp 70,000,000.00	
3)						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Rp 5,000,000.00	
4)						Sub Kegiatan Koordinasi dan	Disnaker	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	12 dokumen	Rp 10,000,000.00	

						Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
5)						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Disnaker	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18 dokumen	Rp 5,000,000.00	
D						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 260,000,000.00	
1)						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Yang disediakan	4 jenis	Rp 10,000,000.00	
2)						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 jenis	Rp 90,000,000.00	
3)						Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Jenis barang cetakan yang disediakan	5 jenis	Rp 10,000,000.00	
							Disnaker	Jumlah Fasilitas Penggandaan Dokumen	12 bulan		
5)						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Fasilitas Rakor SKPD	12 kali	Rp 150,000,000.00	
							Kab. Lumajang dan Luar Daerah	Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD	2 kegiatan		

F						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	Rp 400,000,000.00	
1)						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Rekening yang dibayar	5 rekening	Rp 100,000,000.00	
2)						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Fasilitas Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Rp 300,000,000.00	
G						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100%	Rp 180,000,000.00	
1)						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dipelihara	20 kendaraan dinas	Rp 125,000,000.00	
2)						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lain yang dipelihara	3 jenis	Rp 55,000,000.00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan kegiatan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja untuk tahun anggaran 2022 adalah nihil, dengan demikian penyelenggaraan pemerintah memperhatikan permasalahan serta isu - isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Adapun tabel usulan program dan kegiatan masyarakat tersaji dalam Tabel T.C- 32

TC-.32. Usulan Aktifitas dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No	Usulan Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
					PD Pengusul	Mekanisme
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RKP tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tatanan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Pembangunan tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Selain itu, hasil evaluasi tahun 2020 juga menunjukkan bahwa realisasi Prioritas Nasional (PN) 3, terkait kinerja nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Dampak pandemic Covid-19 pun masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022. Mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh agenda pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi prioritas nasional pada RKP Tahun 2022. Prioritas nasional dalam RKP tahun 2022 adalah :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

RKP Tahun 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Dari 7 prioritas nasional diatas yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Prioritas Nasional ini sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Perubahan Dinas Tenaga Kerja tahun 2019 – 2023 yaitu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan sasaran meningkatnya kualitas pencari kerja, meningkatnya produktifitas tenaga kerja, meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan, meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan, dan meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi. Dalam pencapaian tujuan tersebut, Dinas Tenaga Kerja telah menjabarkan dalam program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2022 antara lain :

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang bertujuan untuk memfasilitasi pelatihan kerja, pembinaan LPKS, peningkatan dan pengukuran produktifitas, serta monitoring ke perusahaan.
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk memfasilitasi perluasan kesempatan kerja melalui padat karya, memfasilitasi CPMI/PMI/PMI Purna, serta memfasilitasi penyebarluasan informasi pasar kerja.

- c. Program Hubungan Industrial yang bertujuan untuk memfasilitasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), memfasilitasi penyelesaian/mediasi perselisihan hubungan industrial, monitoring pengupahan serta pendataan ketenagakerjaan.
- d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang bertujuan memfasilitasi penyuluhan, pelatihan, serta pemberangkatan transmigran.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai pada satu tahun mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2022 adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka disusunlah beberapa sasaran yaitu :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Prosentase Pencari Kerja yang Terlatih
		Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang Produktif

		Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan
		Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase penempatan transmigran sesuai standar

Dengan memperhatikan isu – isu strategis Dinas Tenaga Kerja khususnya dalam masa pandemic Covid–19 ini yaitu :

1. Jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian dan atau ketrampilan masih relative kecil.
2. Rendahnya motivasi pencari kerja untuk berwira usaha karena keterbatasan ketrampilan dan modal usaha.
3. Terbatasnya perkembangan usaha swasta di sektor industri menengah ke atas yang diharapkan dapat menampung membuka kesempatan kerja yang tersedia bagi penganggur.
4. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
5. Belum optimalnya fasilitasi penempatan transmigran.
7. Adanya refocusing anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.

Maka Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai target indikator sasaran memfokuskan pada :

1. Pelaksanaan pelatihan kerja bagi pencari kerja terdaftar berdasarkan klaster kompetensi sebagai upaya peningkatan daya saing tenaga kerja
2. Pelaksanaan metode peningkatan dan pengukuran produktifitas
3. Pelaksanaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja sebagai upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja
4. Pelaksanaan pembinaan kepada perusahaan terkait kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja
5. Pelaksanaan fasilitasi pelatihan bagi catrans serta pemberangkatannya

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2022, serta mempertimbangkan misi kedua Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018 – 2023 yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri maka disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi serta memperhatikan program prioritas nasional, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut tertuang dalam TC. 33 sebagai berikut :

TC. 33 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	aktivitas	Skala Prioritas Aktivitas	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Lokasi Aktivitas	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Pagu aktivitas P1 (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											6,448,348,500	6,448,348,500					
2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							6,299,077,300						7,532,000,000	
2	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,810,000,000						5,417,000,000	
2	0	0	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							30,000,000						33,000,000	
	7	1	0															
			1															

2	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,000,000
					Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1				Dinas Tenaga Kerja		10,000,000					
2	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Dokumen LAKIP	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,000,000
					Penyusunan Dokumen LAKIP	1				Dinas Tenaga Kerja		10,000,000					
2	0	0	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,000,000

2	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			11,000,000
						Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	1				Dinas Tenaga Kerja			10,000,000			
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			7,500,000
						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1				Dinas Tenaga Kerja			5,000,000			
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah jenis laporan keuangan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 dokumen		5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			6,500,000
						Penyusunan Laporan	1				Dinas Tenaga			5,000,000			

2	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lain yang dipelihara		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 jenis		55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,000,000
					Biaya pemeliharaan printer (13 unit)	1					Dinas Tenaga Kerja					26,000,000					
					Biaya komputer (8 unit)	2					Dinas Tenaga Kerja					16,000,000					
					Biaya Laptop (7 unit)	3					Dinas Tenaga Kerja					13,000,000					
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										535,313,300					610,000,000	
2	0	0	2	0	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										450,000,000					510,000,000	
2	0	0	2	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja			Jumlah pencari kerja di latih berdasarkan Klaster Kompetensi		Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan			120 orang		450,000,000		DBHCH T				510,000,000

					berdasarkan Klaster Kompetensi															
					Pelatihan Rotan Sintestis	1					Desa Tamb ahrej o Keca mata n Candi puro					58,926,800				
					Pelatihan Mebelair Almunium	2					Desa Grob ogan Keca mata n Kedu ngjaja ng					93,003,200				
					Pelatihan Pengolahan Makanan	3					Desa Ledok temp uro Keca mata n Rand uagu ng					59,205,400				

2	0	0	2	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah PMI yang di fasilitasi		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 orang		200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000
						Fasilitasi Pelatihan CPMI	1			Kabupaten Lumajang				150,000,000					
						Fasilitasi Pemulangan PMI	2			Kabupaten Lumajang				50,000,000					
2	7	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								153,764,000				285,000,000		
2	7	0	2		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000				120,000,000		
2	7	0	2	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 dokumen		50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembantuan Sub Kegiatan utk Seksi		60,000,000

2	0	0	2	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah Kasus Peselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 kasus		13,764,000					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45,000,000
														9,764,000					
														4,000,000					
2	0	0	2	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas			Jumlah perusahaan yang di Monitoring Pengupahannya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 perusahaan		40,000,000					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120,000,000

3	3	0	2	0	Penyuluhan Transmigrasi		Jumlah Calon Transmigran yang diberikan penyuluhan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 KK	35,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	45,000,000	
2	3	0	1											
						Penyuluhan kepada masyarakat calon transmigran	1				35,000,000			
3	3	0	2	0	Pelatihan Transmigrasi		Jumlah Calon Transmigran dilatih	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 KK	20,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25,000,000	
2	3	0	1											
						Pelatihan Pengolahan Makanan bagi Catrans	1				20,000,000			
TOTAL										6,448,348,500	6,448,348,500			7,532,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta memperhatikan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat, maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan anggaran Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
		Kinerja	Pendanaan
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6,598,348,500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			6,449,077,300
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	4,810,000,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	30,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	5 dokumen	10,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi penyusunan laporan	2 dokumen	10,000,000

	dana spesifik		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,940,000,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	33 ASN	3,850,000,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Fasilitas Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	70,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	12 dokumen	10,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	5,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan	18 dokumen	5,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	260,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan	4 jenis	10,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 jenis	90,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Jenis 12 kali	10,000,000

	Jumlah fasilitas penggandaan dokumen		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Fasilitas Rakor SKPD	2 kegiatan 12 kali	150,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	400,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar	5 rekening	100,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitas Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kali	300,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100%	180,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dipelihara	20 kendaraa n dinas	125,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lain yang dipelihara	3 jenis	55,000,000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja dilatih	100%	685,313,300
	Persentase Peningkatan Produktifitas Perusahaan	100%	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi	20 orang	600,000,000

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja di latih berdasarkan Klaster Kompetensi	120 orang	600,000,000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja dibina	100%	25,313,300
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja dibina	17 LPKS	25,313,300
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Perusahaan kecil yang Melakukan Konsultasi	100%	60,000,000
	Prosentase Perusahaan yang di Monev	100%	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang melakukan Konsultasi Jumlah Perusahaan yang dimonev	70 perusahaan 70 perusahaan	60,000,000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan / difasilitasi	47%	800,000,000
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis pelayanan yang di lakukan	3 jenis	400,000,000
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	400 orang	400,000,000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah jenis media informasi pasar kerja yang di kelola	3 jenis	200,000,000
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencaker ditempatkan melalui penyelenggaraan Bursa pasar kerja	150 orang	200,000,000

Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang di fasilitasi	150 orang	200,000,000
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah PMI yang di fasilitasi	150 orang	200,000,000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	prosentase perusahaan yang mempunyai PP	24%	153,764,000
	prosentase data dan informasi ketenagakerjaan yang tersedia	100%	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen peraturan perusahaan yang disahkan dan jumlah perusahaan yang di bina	15 dokumen	100,000,000
	jumlah perusahaan yang didata	75 perusahaan	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	15 dokumen	50,000,000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	jumlah pendataan perusahaan yang dilaksanakan	75 perusahaan	50,000,000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi	15 kasus	53,764,000

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Peselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	15 kasus	13,764,000
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah perusahaan yang di Monitoring Pengupahannya	100 perusahaan	40,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			149,271,200
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase transmigran terlatih yang ditempatkan	100%	149,271,200
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Transmigran ditempatkan	5 KK	149,271,200
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Transmigran ditempatkan	5 KK	94,271,200
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang diberikan penyuluhan	25 KK	35,000,000
Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dilatih	20 KK	20,000,000
			6,598,348,500

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta Renstra Perubahan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun pada Renja Dinas Tenaga Kerja tahun 2022 ini sudah mempertimbangkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023, tujuan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja tahun 2019 – 2023, serta isu – isu strategis sektor ketenagakerjaan.

Dengan dibuatnya Rencana Kerja Tahun 2022, diharapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 lebih terarah, karena sudah disusun arah yang menjadi acuan, dengan demikian diharapkan lebih tepat guna dan tepat sasaran baik dalam hal pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dalam hal pembiayaan maupun pencapaian target kinerja serta serapan anggaran

KEPALA DINAS TENAGA KERJA



Drs. ABDUL MAJID, M.M
NIP. 19660420 199203 1 008